KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

				· <u>-</u>						
KEMENTERIAN KEUANGAN RI			H.1	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 1 0 4 0					H.4 X Final	
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.2	H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan					Tidak Final	
								H.5		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG										
A.1 NPWP : 3 4 4 8 1 6 9 3 9 7 2 2 0 0 0										
A.2 NIK	:									
A.3 Nama : DINI ADRIYANTI										
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG										
MASA P	1100.	E OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)		TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2		B.2		B.3	B.4		B.5	B.6	B.7	
3 21-402-01		21-402-01		5.774.600	5.7	74.600	0	5	288.730	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota										
B.8 Doki	Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 026/SP2D-GU/BLUD-RSJDAHM/III/2022									
	Nama Dokumen Biaya Pembayaran Tanggal 1 6 dd 0						6 <b>dd</b> 0	3 mm	2 0 2 2 <i>уууу</i>	
В.9	.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.									
								уууу		
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :										
B.11	PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :									
C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK										
C.1 NPWP Instansi Pemerintah :			9 5							
C.2 Nama Instansi Pemerintah			RUMA	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR						
C.3 ID S	C.3 ID Subunit Organisasi :				$oxedsymbol{oxedsymbol{oxedsymbol{\sqcup}}}$ $oxedsymbol{oxedsymbol{\sqcup}}$					
C.4 Tan			1 6	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						
C.5 Nan	.5 Nama Penandatangan :			HARI JUMADI						
C.6 Pernyataan Wajib Pajak :				Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.						
				dengan ketentuan yang iik sehingga tidak diperl	i berlaku, Direktorat Jende ukan tanda tangan.	ral Paja	ik mengatur bahwa	dokumen ini tela	ah ditandatangani secara	

4CHL25FH